

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA PULAU KALIMANTUNG DI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

OLEH :

SITAINI SIHOTANG

218510018



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA PULAU KALIMANTUNG DI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ii

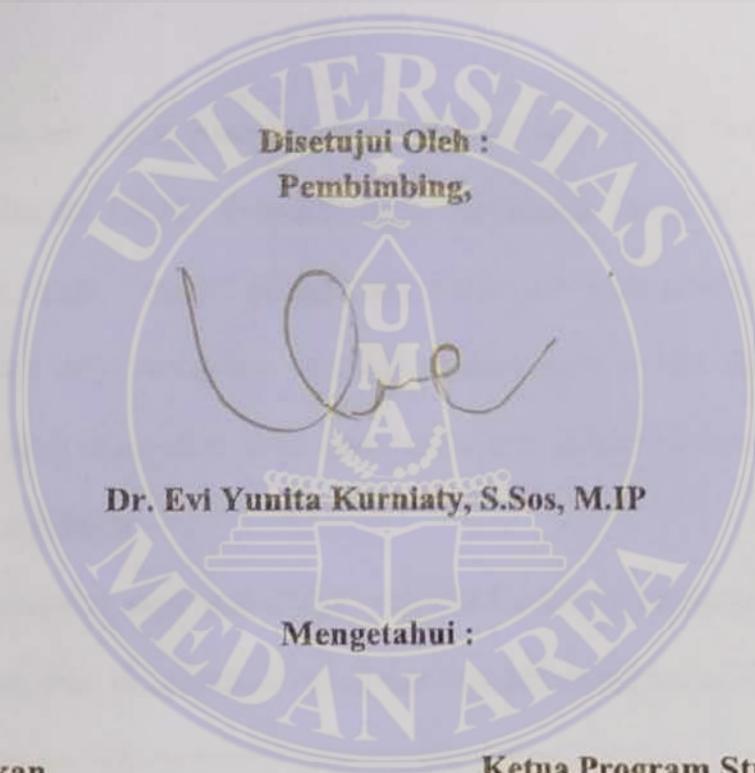
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)10/7/25

BALAMAN PENGESAHAN

Nama : Sitaini Sihotang
NPM : 218510018
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata
Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah**



Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos,M.IP



Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

Tanggal Lulus: 02 Mei 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitaini Sihotang

NPM : 218510018

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata**

Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah” adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil penjiplakan atau karya orang lain yang belum mendapatkan izin. Seluruh kutipan dan referensi yang digunakan telah saya cantumkan dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, saya siap untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Medan, 02 Mei 2025



Sitaini Sihotang
Npm: 218510018

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
bawah ini:

Nama : Sitaini Sihotang
Npm : 218510018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Tanda tangan Elektronik dalam Pelayanan Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database).

Merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal 02 Mei 2025

Yang Menyatakan



Sitaini Sihotang

218510018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pulau Kalimantan, dengan keindahan pantai berpasir putih dan keanekaragaman hayati lautnya, memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan teori peran pemerintah Ryaas Rasyid, ditemukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator belum optimal. Kendala utama meliputi kurangnya regulasi spesifik yang mendukung pengelolaan Pulau Kalimantan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, air bersih, dan fasilitas keamanan, serta minimnya program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat setempat. Promosi pariwisata juga masih kurang maksimal sehingga daya tarik Pulau Kalimantan belum sepenuhnya dikenal luas. Meski pemerintah telah membentuk kelompok sadar wisata dan memulai beberapa langkah pembangunan, dampaknya belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, penyiapan regulasi khusus, serta pelaksanaan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih terarah untuk memajukan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Peran pemerintah, Pemerintah Daerah, pengembangan pariwisata

ABSTRACT

This research aimed to analyze the role of local government in the tourism development of Kalimantan Island in Central Tapanuli Regency. Kalimantan Island, with its beautiful white sandy beaches and marine biodiversity, had great potential as a leading tourist destination. However, its development still faced several challenges that hindered the optimization of that potential. The research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Based on Ryaas Rasyid's theory of government roles, it was found that the role of government as regulator, dynamizer, and facilitator was not yet optimal. The main obstacles included the lack of specific regulations supporting the management of Kalimantan Island, limited basic infrastructure such as transportation access, clean water, and security facilities, as well as minimal community empowerment and training programs. Tourism promotion was also still not optimal, making Kalimantan Island's appeal not widely known. Although the government had formed tourism awareness groups and started several development initiatives, the impact was not yet evenly distributed. This research recommended strengthening coordination between the government and the community, preparing specific regulations, and conducting relevant and sustainable training. The results of this research were expected to serve as a reference for more directed policies to advance tourism and improve local community welfare.

Keywords: *Government Role, Local Government, Tourism Development*



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Sitaini Sihotang
2. Alamat : Jl. Helvetia gang sigantang
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Muarabolak, 05 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon/HP : 0895340095638
9. E-mail : sitainisihotang0507@gmail.com
10. Kode Pos : 22533

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 2008-2014 | : SD NO 153060 MUARABOLAK 2 |
| 2014- 2017 | : SMP N 2 SOSORGADONG |
| 2017- 2020 | : SMA N 1 SORKAM BARAT |
| 2021- sekarang | : UNIVERSITAS MEDAN AREA |

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

Proposal ini merupakan salah satu syarat kelulusan strata S1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area.
4. Dr. Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.I.P selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memperhatikan, serta meluangkan waktunya selama masa penyusunan proposal ini.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah membimbing dan memperhatikan selama masa Pendidikan di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

6. Kedua orang tua dan beserta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan moril, materil, arahan, motivasi, serta doa demi kelancaran dan keberhasilan dalam menempuh Pendidikan di program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
7. keberhasilan dalam menempuh Pendidikan di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
8. Serta semua pihak yang telah membantu selama penyusunan proposal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam proposal ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Penulis berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 02 Mei 2025

Penulis



Sitaini Sihotang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Peran	7
2.2 Pemerintah dan Pemerintahan.....	8
2.3 Peran Pemerintah	10
2.4 Pemerintah Daerah.....	11
2.4.1 Defenisi Pemerintah Daerah.....	11
2.4.2 Fungsi Pemerintah Daerah	12
2.4.3 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	13
2.5 Pengembangan Pariwisata.....	14

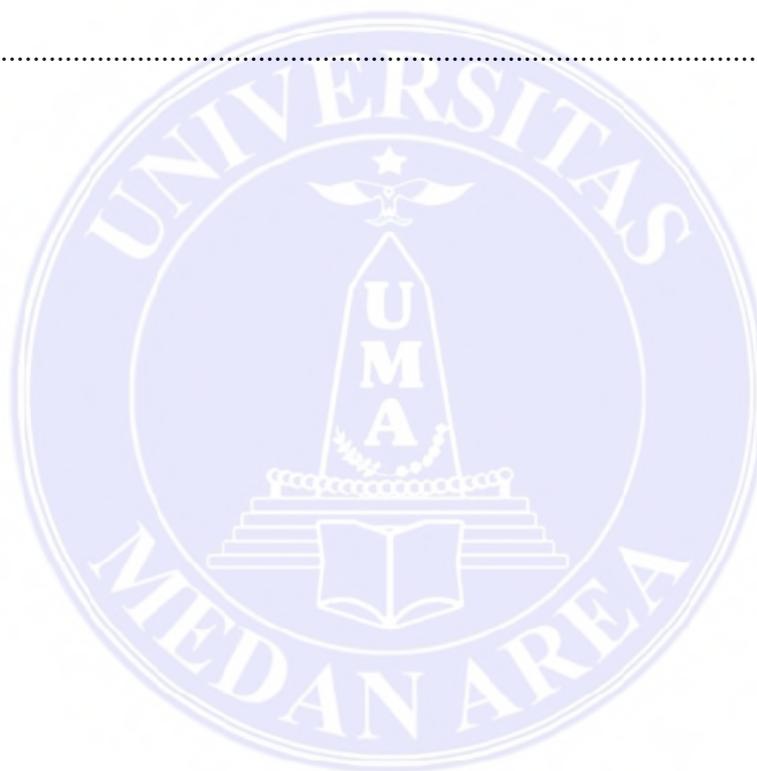
2.5.1 Dampak Pariwisata.....	18
2.6 Penelitian Terdahulu	19
2.7 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Informan Penelitian.....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.6 Lokasi dan Jawal Penelitian.....	36
3.6.1 Lokasi penelitian	36
3.6.2 Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil	38
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.....	38
4.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah.....	42
4.1.3 Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	44
4.1.4 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	45
4.1.5 Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Tengah	51
4.1.6 Gambaran Umum Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	53
4.2 Pembahasan.....	54
4.2.1 Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	54
4.1.3 Faktor Penghambat Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah	90
BAB V.....	102

KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1 KESIMPULAN.....	102
5.2 SARAN PENULIS.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran Surat Pernyataan Riset	109
Lampiran Surat Kedua Selesai Riset	110
Lampiran Dokumentasi.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2 Informan Penelitian.....	29
Tabel 3 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 5 Jumlah Lokasi Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pulau Kalimantan.....	3
Gambar 2 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	40
Gambar 4 Lapangan Pekerjaan Utama Mulai dari 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	44
Gambar 5 Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	46
Gambar 6 Data Kunjungan Wisata Di Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah	48
Gambar 7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Tengah Tahun 2018.....	51
Gambar 8 Pulau Kalimantan.....	53
Gambar 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	56
Gambar 10 Dermaga Pulau Kalimantan.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, menggerakkan roda perekonomian, dan menjaga keberlanjutan budaya lokal. Dengan pengelolaan yang terencana dan terpadu, pariwisata dapat menjadi penggerak utama dalam menarik kunjungan wisatawan domestik maupun internasional untuk menikmati kekayaan alam, sejarah, dan budaya suatu wilayah. Pariwisata menciptakan peluang kerja baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui usaha mikro seperti kerajinan tangan dan kuliner khas, maupun melalui industri yang lebih besar seperti perhotelan dan transportasi. Pertumbuhan ini tidak hanya dirasakan di sektor formal, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi informal di sekitar destinasi wisata. Dari perspektif pembangunan, sektor pariwisata sering kali menjadi katalisator perbaikan infrastruktur. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan kualitas aksesibilitas, seperti jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, untuk mendukung kemajuan pariwisata. Perbaikan ini tidak hanya menguntungkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Pariwisata tidak hanya tentang menarik pengunjung, tetapi juga tentang bagaimana suatu wilayah dapat menampilkan keunggulan dan potensinya dengan cara yang bertanggung jawab. Jika dikelola dengan bijak, sektor ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berdampak luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi cerminan kekayaan identitas lokal kepada dunia. Salah satu daerah yang wajib dikunjungi adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah, bagian dari Sumatera Utara yang menyimpan pesona alam yang memukau, mulai dari pantai eksotis hingga air terjun yang menakjubkan, sehingga membuat daerah ini menjadi tujuan wisata yang populer. Maka tidak heran bila pemerintah dan masyarakat setempat memberikan slogan “Negeri Wisata Sejuta Pesona” karena potensi keindahan alam, kekayaan budaya, dan upaya pemerintah Kabuapten Tapanuli Tengah untuk mengembangkan sektor pariwisata, sehingga slogan ini sangatlah relevan dan tepat untuk menggambarkan daerah ini (Irwan Arfa, 2013).

Mulai dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, terdapat 229.193 kunjungan wisata dan pada tahun 2020 sebanyak 331.206 kunjungan. Dari kunjungan tersebut, tujuan wisata Tapanuli Tengah dapat terdiri dari: 1. Pantai sebanyak 57 objek; 2. Situs Sejarah sebanyak 27 objek; 3. Pulau sebanyak 28 objek; 4. Air Terjun sebanyak 30 objek; dan 5. Pemandian sebanyak 32 objek (BPPD, 2022). Salah satu destinasi wisata Kabupaten Tapanuli Tengah ialah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak pada kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki daya tarik bagi wisatawan karena keindahan pulau kalimantung sudah dirasakan selama perjalanan menuju pulau. Wisatawan akan dimanjakan oleh laut berwarna biru, di pulau Kalimantan wisatawan dapat menghabiskan waktu dengan snorkeling sambil menikmati keindahan berbagai ragam ikan dan terumbu karang.

Meskipun di bawah sinar matahari, wisatawan tidak akan merasakan panas karena adanya batu granit dan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar pulau. Berdasarkan profil pulau-pulau kecil pemerintahan Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2020 Pulau Kalimantan terdiri dari 2 jenis yaitu Pulau Kalimantan Nagodang dan Pulau Kalimantan Namenek. Topografi Pulau Kalimantan Nagodang ini secara umum relatif datar dan landai (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023).

Sedangkan Pulau Kalimantan Namenek memiliki topografi berbentuk datar dan pantai berpasir putih dan sebagian tebing dengan vegetasi yang didominasi oleh tumbuhan pandan, kelapa, waru, rumput dan bakau. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk, saat ini berkembang sebagai salah satu tempat wisata (Tapanuli Tengah, 2020). Pulau Kalimantan dan Labu labu gadang saling berdekatan sehingga pada saat surut terendah kedua pulau ini menyatu oleh pasir putih yang sangat indah.

Gambar 1
Pulau Kalimantan



*Sumber: Profil pulau-pulau kecil pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2020*

Dilihat dari keindahan pulau kalimantung diperlukan sebuah pembangunan dalam wisata tersebut supaya wisatawan merasa nyaman selama mereka berkunjung di wisata tersebut, maka pembangunan dan pengembangan destinasi wisata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dari dua jenis pulau kalimantung ini pulau yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Pulau Kalimantan Na menek, karena pulau ini saling berdekatan dengan pulau Labu labu gadang sehingga pada saat surut terendah kedua pulau ini menyatu oleh pasir putih yang sangat indah. Berdasarkan hasil Observasi dengan wawancara pada Maret 2023 bersama bapak Muhammad Yusuf damanik (Meuraxa., 2023) bahwa dapat diperkirakan jumlah wisatawan yang berangkat ke pulau kalimantung dan pulau Mursala per Bulan januari 2023 sebanyak 1.080 Orang.

Peningkatan potensi Pulau Kalimantan sangat membutuhkan peran pemerintah daerah karena Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi *motivator* dan *fasilitator* dalam pengembangan potensi pariwisata, termasuk dalam mengembangkan pariwisata pulau kalimantung yang memiliki daya tarik yang bagus ,seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata.

Namun untuk saat ini peran pemerintah belum optimal dalam menjalankan perannya dalam pengembangan pariwisata pulau Kalimantan, hal ini dapat dilihat dari infrastruktur yang belum memadai, kurangnya promosi dan pemasaran,

pengelolaan sampah dan limbah masih menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan laut dan pantai, kapasitas daya dukung lingkungan, dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas (Meuraxa dkk., 2023). Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan pengembangan potensi pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, serta menambah uraian yang bersifat teoritis, khususnya pada opini Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area terhadap peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan sumber informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Artinya peran dapat diartikan sebagai fungsi yang terwujud akibat dari suatu tindakan (Syaiful Hakim, 2022). Peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya (Brigette Lantaeda., 2002). Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Indra Slamet Gumelar (2018:63-64) mendefinisikan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, merujuk pada teori peran (role theory) Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam golongan, yaitu : 1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto (Syaiful Hakim, 2022) peran adalah sebuah proses yang dinamis dari status ataupun kedudukan. Suatu peran dianggap telah dilaksanakan ketika individu telah menjalankan setiap hak dan kewajiban yang berdasarkan pada kedudukannya. Posisi antara kedudukan dan peranan tidak dapat

dipisahkan dikarenakan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Menurut Soekanto (Ahmad Jauharul, 2020) peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik.

2.2 Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba atau komando. Istilah pemerintah berarti badan atau lembaga yang memerintah. Selanjutnya istilah pemerintahan adalah perbuatan, cara, proses atau hal urusan memerintah. Menurut Victor Situmorang dalam Solihah (2019:1.4), secara etimologi pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu: Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah, yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri. Sedangkan Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapat akhiran –an, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan.

Dengan kata lain, pemerintahan, adalah perbuatan memerintah. Selanjutnya menurut Poerwadarmita mengatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara seperti cabinet merupakan suatu pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan Negara itu sendiri (Paru Selni, dkk, 2019:4). Ryaas Rasyid (1996) dalam Solihah (2019:1.12), mengemukakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya yang wajar. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Ryaas Rasyid (1996) adalah sebagai berikut: 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan; 2. Memelihara tata tertib dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai; 3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan, di mana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta di mana perselisihan bisa didamaikan; 4. Melakukan pekerjaan/urusan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social; 6.

Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat; 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas tugas utama pemerintah adalah mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaturan melibatkan pembuatan kebijakan dan pengawasan, sedangkan pelayanan mencakup penyederhanaan prosedur, percepatan proses, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Kemudian, Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider (penyedia) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri (Solihah 2019:1.14).

2.3 Peran Pemerintah

Peran pemerintah ialah suatu tindakan dari instansi atau lembaga pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi mereka (Masruroh, 2021). Maka, Ryaas Rasyid (2010:32), mengatakan Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

peraturan-peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, Pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2.4 Pemerintah Daerah

2.4.1 Defenisi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah (Caron & Markusen, 2016). Menurut undang -undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4.2 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahAN. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (HAFIZ SUTRISNO, 2019) adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana

hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.4.3 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya:

1. Mengajukan rancangan Perda
2. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
3. Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Pengembangan Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” berarti penuh, sedangkan “wisata” artinya perjalanan. Sehingga secara keseluruhan pariwisata diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan. Secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”, pari berarti banyak, berkali-kali, berulang-ulang, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian, jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat lain (Suryani, 2017:34). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sementara Menurut Sri Handayani dan Siti Hanila (2021:372) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dan bukan untuk menetap. Kegiatan perjalanannya bertujuan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang dibutuhkan, selama berada diluar tempat tinggalnya.

Pengembangan Pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia (Darmatasia.dkk, 2020:8708). Menurut Suwarti Yuliamir (dalam Dr. Sri Susanty,dkk, 2020:224) menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, yaitu; 1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan segala kegiatan pariwisata; 2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan pariwisata; 3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.

Pengembangan pariwisata menurut Suswantoro dalam Muhamad Ismail (2020:61) dalam pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui:

a. Promosi

promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus secara terpadu baik didalam maupun diluar negeri

b. Aksebilitas

Aksebilitas merupkana salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

c. Kawasan Pariwisata.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata menurut Safarandi (2021:11-12) adalah:

1. Wisatawan (Tourism)

Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia, hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan. Kunjungan wisata sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisata, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan motif prestise.

2. Transportasi

Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak mulai satu tempat menuju tempat lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah konektivitas antar daerah, tidak ada penghalang, serta tersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan.

3. Atraksi/obyek wisata

Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang berkunjung. Atraksi wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat hiburan, museum dan peninggalan sejarah, dan sebagainya. Menurut Sri Handayani dan Siti Hanila (2021:374), daya tarik wisata digolongkan menjadi 3, yaitu: pertama, Potensi Alam Bentang alam, flora, dan fauna adalah daya tarik wisata yang sangat menarik. Alam menawarkan jenis pariwisata aktif maupun pasif disamping sebagai objek penelitian/studi atau widyawisata; kedua, Potensi Budaya kekayaan budaya daerah, busana daerah, upacara adat, (yang juga menjadi bagian busana nasional), dan kesenian daerah adalah potensipotensi yang dapat menjadi daya tarik wisata bila dikemas dan disajikan secara professional tanpa merusak nilai-nilai dan norma-norma budaya aslinya; dan ketiga, Potensi Manusia harus ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek pariwisata. Manusia dapat menjadi atraksi pariwisata dan

menarik kunjungan wisatawan bukan hal yang luar biasa. Sudah tentu, manusia sebagai atraksi pariwisata tidak boleh direndahkan kedudukannya hingga kehilangan martabatnya sebagai manusia.

4. Fasilitas pelayanan

Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata adalah ketersediaan akomodasi (hotel), restoran, prasarana perhubungan, fasilitas telekomunikasi, perbankan, petugas penerangan, dan jaminan keselamatan. Selain syarat fasilitas dan pelayanan fasilitas, hotel akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata jika memenuhi persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi menuntut lingkungan yang dapat mendukung citra hotel, demikian juga dengan syarat aksesibilitas yang menuntut hotel harus mudah ditemukan dan mudah dicapai.

5. Informasi dan promosi

Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan.

Untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Rencana ini harus menyalurkan sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial negara, serta memberikan arah yang jelas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong dan mengendalikan pertumbuhan sektor pariwisata. Ada beberapa benang merah pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama, penerapan strategi perluasan

kesempatan berusaha bagi kalangan miskin di sekitar kawasan pariwisata. Kedua, perluasan kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Ketiga, pencegahan degradasi mutu lingkungan yang berdampak langsung dan lebih rentan bagi masyarakat. Keempat, penekanan pada upaya meminimalkan dampak sosial budaya pariwisata. Kelima, pendampingan masyarakat lokal untuk pengembangan bisnis inti dan pendukung pariwisata. Keenam, promosi organisasi lokal yang dibentuk untuk kepentingan pariwisata.

2.5.1 Dampak Pariwisata

Menurut Pitana dan Gayatri (Sudiarta dkk., 2021) dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup sebelum adanya kegiatan pariwisata dan setelah adanya kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung yang berupa dampak fisik maupun non fisik. Menurut Leiper (Sudiarta.dkk, 2021) dampak positif perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut, 1. Pendapatan dari penukaran valua asing, 2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, 3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, 4. Pendapatan pemerintah, 5. Penyerapan tenaga kerja, 6. Multiplier effects, 7. Pemanfaatan pasilitas pariwisata oleh masyarakat local (Pitana & Diarta, 2009). Di samping menimbulkan dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi suatu daerah atau negara.

Namun pada umumnya dampak negatif ini memiliki magnitudo lebih kecil dibandingkan dampak positifnya. Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut; 1. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, 2. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah, 3. Meningkatnya kecendrungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal

tidak terserap, 4. Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan cepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya, 5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan yang memperkaya dan mendalami kerangka teoretis dalam penelitian ini. Neng Yayu Padaniah dan Haryono (2021:5) mengemukakan bahwa Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama akan tetapi memiliki keterkaitan dalam penelitian terdahulu. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan	Sumber
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Holmes Rajagukgu-k, Juandi Nababan, Bonari Tambunan, Musrafidin, Simanullang-g, Lamma Sihotang (2023)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H20) Danau Toba Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Toba Balige Sumatera Utara	Pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan fenomena sehingga lebih sistematis	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Holmes Rajagukguk, Juandi Nababan, Bonari Tambunan, Musrafidin Simanullang, Lamma Sihotang dengan penelitian yang dikerjakan penulis ialah menggunakan teori yang sama yaitu model kerangka kerja Ryaas Rasyid (2010:32) tentang peran pemerintah sebagai Regulator, peran pemerintah sebagai Dinamisator, dan Peran pemerintah sebagai Fasilitator	Sementara perbedaan yang ada diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah tentang pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Toba Balige Sumatera Utara. Penelitian terdahulu berfokus dalam mengembangkan Potensi Pariwisata Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H20) Danau Toba sedangkan penulis berfokus pada pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah	Jurnal

I	I		IV	V	VI	VII
2.	Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga (2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam	Metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan beberapa data yang didapat di lapangan.	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga (2021), dengan penelitian yang di kerjakan penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Sementara perbedaan yang ada diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam dengan studi kasus di Pantai Oetune sedangkan penulis berfokus pada pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan. Sedangkan penulis menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010:32) untuk melihat Peran Pemerintah. sementara penelitian terdahulu menggunakan teori Cooper (dalam Suwena, 2017) yang melihat komponen daya tarik wisata alam	Jurnal

I	II	III	IV	V	VI	VII
3	Desmayet, Junriana, Dwi Aprita (2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembang an Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas	Metode deskriptif dengan pendekat- an Kualitatif dengan Teknik pengumpu lan data melalui observasi dan wawancar -a	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Desmayeti, Junriana, Dwi Aprita (2021) dengan penelitian yang penulis kerjakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian diKabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang sedangkan penulis berfokus pada pengembangan pariwisata Pulau Kalimantung. dan penulis menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010:32) untuk melihat Peran Pemerintah.	Jurnal

I	II	III	IV	V	VI	VII
4	Matheus Gratiano Mali (2021)	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visting Jogja	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Matheus Gratiano Mali (2021), dengan penelitian yang dikerjakan penulis ialah . sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Pariwisata Era New Normal Melalui Aplikasi Visting Jogja sedangkan penulis berfokus pada pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan. dan penulis menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010:32) untuk melihat Peran Pemerintah	Jurnal

I	II	III	IV	V	VI	VII
5	Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussam a-d, Arif Bobihu, Mutia Hunaini (2023)	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Dikawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia Hunaini (2023) dengan penelitian yang di kerjakan penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata	Sementara perbedaan yang ada diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Potensi Pariwisata Dikawasan Pesisir sedangkan penulis berfokus pada pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan. dan penulis menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010:32) untuk melihat Peran Pemerintah.	Jurnal

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024

2.7 Kerangka Berpikir

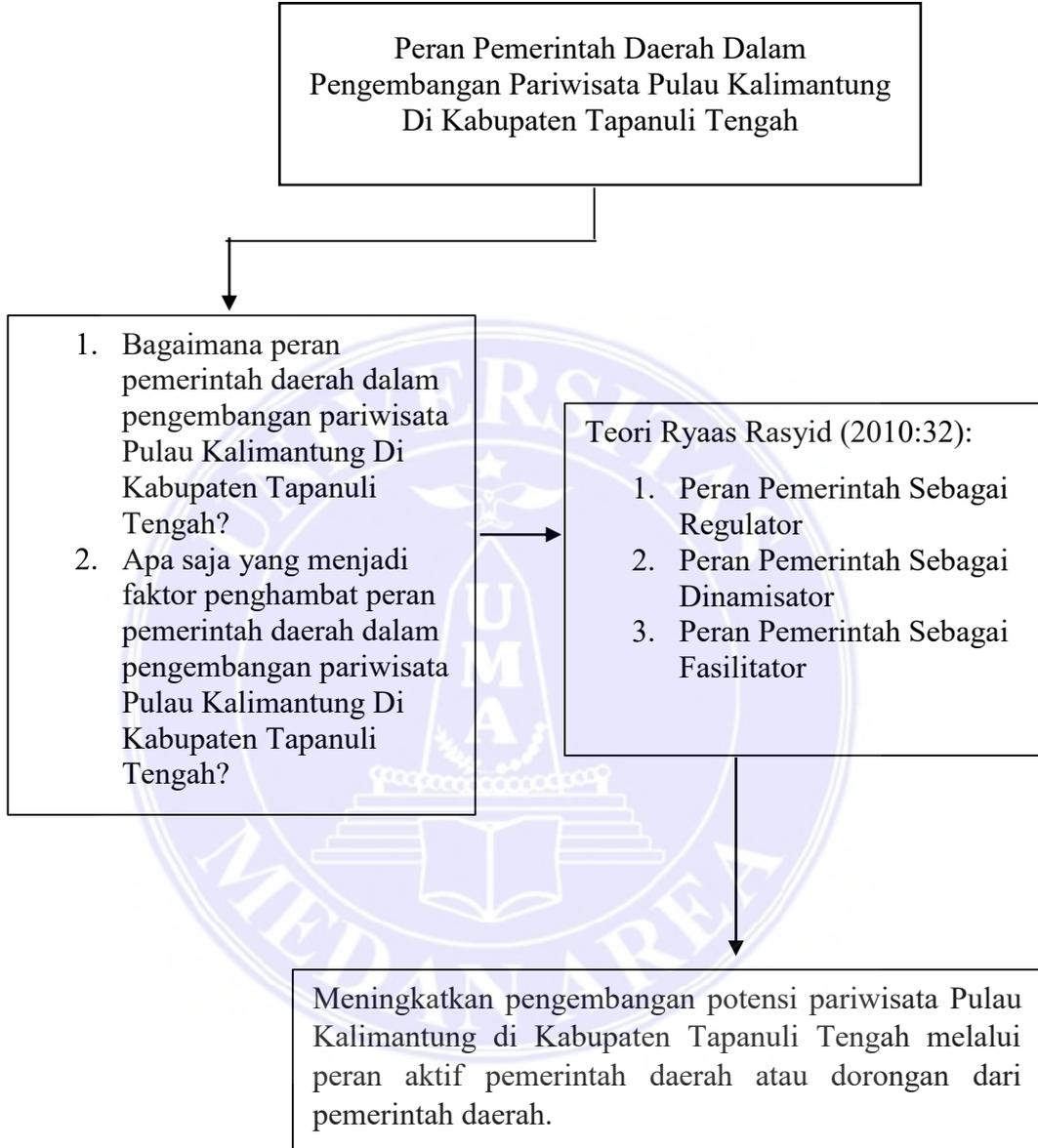
Kerangka berpikir adalah kerangka kerja penelitian yang menjelaskan secara menyeluruh apa yang akan diteliti, berdasarkan temuan penelitian yang sudah ada. Menurut Polancik (2009), kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian (Salmaa, 2023a). Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau Kalimantan.

Ryaas Rasyid (2010:32) mengatakan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain: Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator, dan Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator. Penulis memilih teori ini karena konsep teori ini menggambarkan bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya secara menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan pendukung masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai regulator, pemerintah berperan menciptakan aturan dan kebijakan yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan ini penting agar tercipta tatanan yang adil, teratur, dan harmonis. Tanpa regulasi, aktivitas masyarakat dan sektor swasta bisa berjalan tanpa arah dan menimbulkan ketidakseimbangan. Tetapi, sekadar mengatur saja tidak cukup, masyarakat dan dunia terus berkembang dan peran pemerintah harus mampu mengikuti dinamika tersebut. Di sinilah pentingnya peran sebagai dinamisator.

Pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak perubahan yang positif. Ia harus mampu mendorong inovasi, mempercepat perkembangan di berbagai sektor, serta menciptakan peluang bagi masyarakat untuk maju. Misalnya, pemerintah mendorong penggunaan teknologi, memberdayakan UMKM, atau mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis. Peran ini menjadikan pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menciptakan kemajuan. Namun, kemajuan tidak bisa dicapai hanya dengan mengatur dan mendorong. Pemerintah juga perlu menjadi fasilitator yang membuka jalan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan semua pihak—baik individu, komunitas, maupun sektor swasta—untuk bekerja sama. Pemerintah memberikan akses, dukungan, dan peluang agar setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi dan berkembang. Ketiga peran ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Pemerintah yang hanya bertindak sebagai pengatur bisa dianggap otoriter, sementara pemerintah yang hanya menjadi pendorong tanpa aturan bisa kehilangan arah. Begitu juga, jika pemerintah tidak menjadi fasilitator, pembangunan bisa berjalan tidak inklusif. Oleh karena itu, teori Ryass Rasyid memberikan perspektif yang lengkap tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dengan seimbang dan relevan.

Kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2
Kerangka Berpikir



Sumber: Dikelola oleh peneliti 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah. Metode penelitian memberikan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur untuk melaksanakan penelitian, seperti peta jalan yang menunjukkan arah penelitian dari awal hingga akhir. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat meminimalisir bias dan subjektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian pun menjadi lebih objektif dan dapat diandalkan. Metode penelitian yang baik memungkinkan penelitian dilakukan ulang oleh peneliti lain, Hal ini penting untuk memverifikasi hasil penelitian sebelumnya dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut. Melalui penerapan metode yang sesuai, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitiannya memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Metode Penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada ada pada dalam peneletian ini.

Muhammad Rijal Fadli (2021:50) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif ini penulis berharap untuk menemukan data-data melalui kata kata yang tertulis maupun lisan berdasarkan pengamatan yang didapatkan penulis dilapangan.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah partisipan yang secara khusus dipilih untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan informan ini didasarkan pada kesesuaian mereka dengan topik atau fokus penelitian yang telah ditetapkan. Informan penelitian adalah partisipan yang secara khusus dipilih untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan informan ini didasarkan pada kesesuaian mereka dengan topik atau fokus penelitian yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (dalam Dianti, 2017:25) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Menurut Ade Heryana (2020:4-6) menjelaskan bahawa Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti; 2. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita, dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari; 3. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan

informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Penulis memilih menggunakan teknik purposive sampling, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti (Khosiah, Hajrah, 2017:143), sehingga dengan menggunakan teknik purposive sampling ini penulis akan memilih informan yang lebih mengetahui tentang pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan.

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah	1	Informan Kunci
2	Kepala Bidang Pengembangan Objek wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah	1	Informan Utama

3	Masyarakat atau pengunjung Pulau Kalimantan Kabupaten Tapanuli Tengah	2	Informan Tambahan
4.	Pengusaha sektor Swasta di sekitaran Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah	2	Informan Tambahan
Jumlah		6	

Sumber: Dikelola Peneliti, 2024

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Menurut Saroso dalam Zhahara Yusra , Rufran Zulkarnain (2021:4) dan Sofino mengatakan bahwa wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkandata yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.

Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi

secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.

2. Observasi

Menurut Basrowi dan Suwandi Dalam buku memahami penelitian kualitatif, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa bisa berupa perilaku manusia fenomena atau proses perubahan (Afra, 2023).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Prawiyogi dkk., 2021) mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Sugiyono pengumpulan dokumentasi dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dari jawaban pertanyaan dan foto-foto metode dokumentasi digunakan rangka memberikan gambaran kongrit tentang pristiwa dan aktivitas kerjasama guru inti pendamping dalam penyusunan perangkat pembelajaran (dalam Hazni dkk., 2023:6).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Analisis Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami.

Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya (Abdul, 2020:16). Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: 1. Katakata dan; 2. tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Rijali, 2019:85-86).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2019:91). Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan (Abdul, 2020:17). Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Penyajian Data

Tahap setelah reduksi data adalah menyusun informasi yang sudah disederhanakan ke dalam bentuk cerita atau narasi. Hal ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami dan hubungan antar data lebih jelas, sehingga peneliti dapat merencanakan langkah penelitian berikutnya dengan lebih baik. Penyajian data

merupakan proses mengorganisasi informasi yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana dan mudah dicerna. Tujuannya agar data yang telah direduksi dapat dipahami dengan jelas, serta hubungan antar data terlihat lebih jelas. Dengan begitu, peneliti dapat merencanakan langkah-langkah penelitian selanjutnya secara lebih efektif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari proses penelitian. Ketika data yang terkumpul sudah cukup untuk dianalisis, peneliti akan membuat kesimpulan sementara. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh, barulah peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang lebih kuat. Seiring dengan proses pengumpulan data, peneliti secara berkala akan menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada. Namun, kesimpulan akhir yang lebih komprehensif baru dapat diambil setelah semua data telah dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah objek atau subjek yang diteliti untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian, sumber data bisa berupa manusia (yang kita sebut responden ketika menggunakan kuesioner atau wawancara), benda mati, peristiwa, atau bahkan tempat. Data yang kita kumpulkan dari sumber-sumber ini akan menjadi dasar untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. Adapun 2 jenis data yang akan dianalisis penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan

spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarakan melalui internet (Ummah, 2019:3). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti langsung dari sumber informan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis (Sari & Zefri, 2019:311). , Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan kurangnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.6 Lokasi dan Jawal Penelitian

3.6.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih secara strategis untuk memperoleh data akurat dan relevan yang mendukung tujuan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis berada di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan penulis yaitu sejak bulan Agustus 2024.

Tabel 3.
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Jul 24	Agst 24	Okt 24	Nov 24	Jan 25	Feb 25
1	Pengajuan Judul						
2	Observasi Awal						
3	Penyusunan Proposal						
4	Bimbingan dan Perbaikan Proposal						
5	Seminar Proposal						
6	Revisi Proposal						
7	Observasi Lapangan dan Wawancara						
8	Penyusunan Bab IV-V						
9	Seminar Hasil						
10	Bimbingan dan Perbaikan						
11	Sidang Skripsi						

Sumber : Dikelola oleh peneliti 2024

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan informan tentang bagaimana Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli dilihat dari tiga indikator yaitu yang pertama peran pemerintah sebagai regulator, kedua peran pemerintah sebagai dinamisator, dan yang ketiga peran pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli belum sepenuhnya optimal. Meskipun berbagai upaya telah menunjukkan hasil yang signifikan, seperti penerbitan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepariwisataaan, pembentukan Pokdarwis, pelatihan masyarakat, dan edukasi pelestarian lingkungan, penyediaan infrastruktur dasar, seperti listrik dan homestay, yang mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata. Dapat di katakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala yang menghambat efektivitasnya seperti Keterbatasan anggaran, minimnya keterlibatan sektor swasta, dan celah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Infrastruktur transportasi dan fasilitas umum belum memadai, pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan profesi, kurangnya pengelolaan transportasi yang terorganisir, serta minimnya kolaborasi lintas sektor menjadi kendala besar. Selain itu, kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, serta tantangan infrastruktur dan lokasi terpencil, memperlambat pengembangan pariwisata. Jadi, meskipun meskipun terdapat beberapa program langkah positif, masih diperlukan perbaikan dan

pengawasan untuk mencapai hasil yang benar-benar optimal.

2. Faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli terkendala oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pendanaan dan investasi di sektor pariwisata, Minimnya minat investor untuk menanamkan modal, Kondisi alam yang sulit diprediksi, keterbatasan akses informasi, kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam forum atau kegiatan yang telah disediakan, Kurangnya kehadiran atau keterlibatan pelaku usaha dalam forum tersebut, serta peran asosiasi pelaku usaha yang tidak berjalan optimal sebagai penyambung informasi. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan teknologi, jalan menuju destinasi wisata masih sangat terbatas dan lambat, keterbatasan teknologi juga memperlambat penyebaran informasi yang dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata.

5.2 SARAN PENULIS

Untuk meningkatkan pengembangan Pulau Kalimantan maka saran dari penulis adalah pemerintah perlu memperhatikan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi hambatan dalam peran pemerintah sebagai regulator, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan alokasi anggaran secara efisien dan mendorong investasi sektor swasta melalui insentif yang menarik. Komunikasi dengan masyarakat harus diperkuat melalui dialog langsung dan penyebaran informasi yang mudah diakses, sehingga regulasi dapat dipahami dan diterapkan dengan lebih baik. Selain itu, fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi dan fasilitas umum, serta

peningkatan aspek keselamatan wisatawan, harus menjadi prioritas utama agar pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Untuk meningkatkan peran sebagai dinamisator, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menyusun program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan profesi masyarakat lokal, sehingga keterampilan yang diberikan dapat langsung diaplikasikan. Pengelolaan transportasi harus lebih terorganisir dengan melibatkan pelaku usaha lokal dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan akademisi, komunitas, dan pelaku bisnis, perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan yang lebih menyeluruh. Dengan perencanaan berbasis kebutuhan dan tindakan yang terarah, pemerintah dapat mengatasi tantangan lokasi terpencil dan infrastruktur, sehingga pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses air bersih dan fasilitas keselamatan, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata secara berkelanjutan. Untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan provinsi dan pusat, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memperkuat kapasitas mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta. Pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas tingkatan pemerintahan juga penting untuk memastikan pengembangan

Pulau Kalimantan berjalan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Rasyid Ryaas. (2010). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: mutiara sumber widya
- Tengah, B. P. S. K. T. (2023). *Statistik Daerah*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah
- Tengah, P. K. T. (2020). *Profil Potensi Pulau Pulau Kecil*. Kabupaten Tapanuli Tengah
- Ismayanti. (2020). *Dasar-Dasar Pariwisata (Sebuah Pengantar)*. Buku Dasar-dasar Pariwisata. Jakarta: Universitas Sahit

Jurnal- jurnal

- Desmayeti dkk. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(1), 645–653.
<http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/61/52>
- Gumelar, I. S. (2018). Peran Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Anak Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Caraka Prabu*, 2(1), 60–77. <https://doi.org/10.36859/jcp.v2i1.400>
- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.31334/jd.v3i1.1796>

Meuraxa, R., Tarigan, A., & Marliyah, M. (2023). Tourism Sector Development Strategy Of Kalimantan Island And Mursala Island In Islamic Economic Perspective. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2 SE-Articles), 1823–1834.

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/4852>

Nugraha, Y. E., dkk. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam. *Media Wisata*, volume 19(1), 67–70.

<https://doi.org/10.36275/mws>

Rajagukguk, H., dkk., Sisingamangaraja, U., & Tapanuli, X. (2023). The Role Of Local Governments In Developing The Tourism Potensial Of The F1 Powerboat World Championship (F1H20) Lake Toba As An Effort To Improve The Welfare Of The People Of Toba Balige Regency, North Sumatra Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan P. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 7252–7260.

<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

Tui, F. P., dkk. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.682>

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Web dan Lain-lain

Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.

Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21, 50.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M. . (2019). *PEMERINTAH DAERAH*.

Ismail, M. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua. *Matra Pembaruan*, 4(1), 59–69. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.59-69>

Irwan Arfa. (2013). *Tapanuli Tengah, “Negeri Wisata Sejuta Pesona.”* 12 JANUARI. <https://sumut.antaraneews.com/berita/96165/tapanuli-tengah-negeri-wisata-sejuta-pesona>

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (2023). *Pulau Kalimantan Nagodang*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Kalimantan_Nagodang

Afra, F. (2023). *5 Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertiannya*. 25.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya.text=atau proses perubahan.-,2>.

Wawancara, pengetahuan individu mengenai topik penelitian.

Lampiran Surat Pernyataan Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : *UMA/FIS.0/01.10/X/2024* Medan, 31 Oktober 2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Tengah
Jl. Raya Junjungan 18, Pandan Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
22537

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sitaini Sihotang
N P M : 218510018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tapanuli Tengah untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Kalimantan di Kabupaten Tapanuli Tengah"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

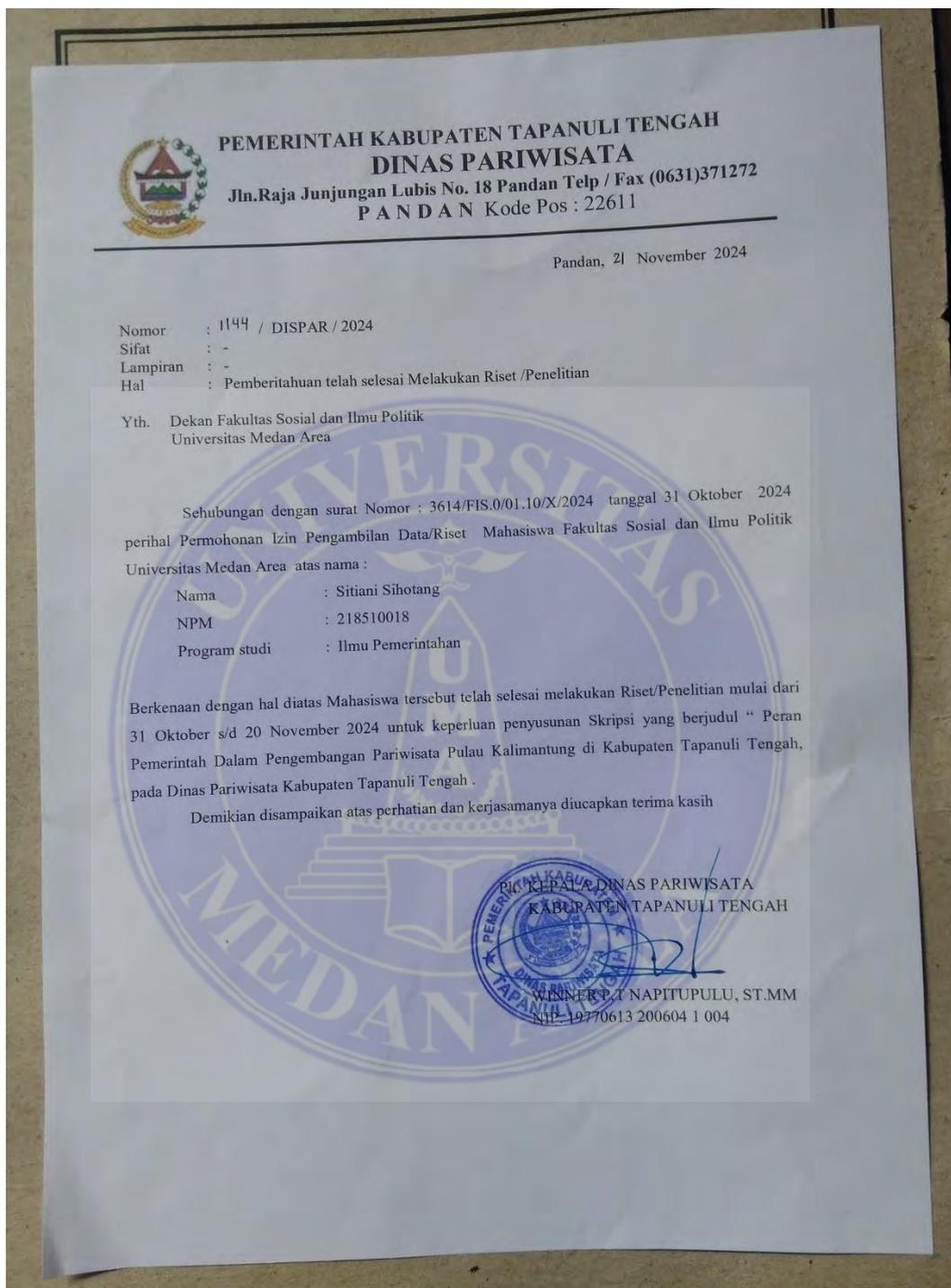
Dekan,

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Lampiran Surat Kedua Selesai Riset



Lampiran Pedoman Wawancara

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Pemerintah sebagai Regulator

Informan kunci :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Bagaimana efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Informan Utama :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Apa strategi Dinas Pariwisata dalam mempromosikan objek wisata pulau kalimantung ke pasar nasional dan internasional

Informan tambahan (Dika) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Sejauh mana anda merasa peraturan pemerintah telah mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Kalimantan

Informan tambahan (sara) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Informan tambahan (Andi Marbun) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Bagaimana bapak memfasilitasi kapal bapak apabila pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang ada dalam kapal tersebut
- c. Apakah bapak pernah menerima bantuan dari pemerintah terkait pengembangan pulau kalimantung

Informan tambahan (Rafi Ardiansyah):

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

- b. Seperti yang bapak bilang tadi, bapak pernah mendengar ada pelatihan kepada masyarakat lokal. Apakah bapak tidak mengikuti pelatihan tersebut
- c. Apakah bapak pernah menerima bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha

2. Pemerintah sebagai dinamisor

Informan kunci :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata pulau kalimantung yang telah di buat pokdarwis di Kabupaten Tapanuli Tengah”

Informan Utama :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Jika pengangkutan ke pulau kalimantung masih bersifat individual apakah pendapatan dari pengangkutan juga di setor ke pemerintah

Informan tambahan (Dika) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Informan tambahan (sara) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Informan tambahan (Andi Marbun) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Bagaimana cara bapak mendorong pengunjung untuk ikut serta menjaga kebersihan dan keamanan di sekitar pulau kalimantung atau selama bapak melakukan perjalanan menuju pulau kalimantung

Informan tambahan (Rafi Ardiansyah):

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Lalu apakah bapak pernah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh pemerintah kepada masyarakat

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Informan kunci :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Apakah pemerintah turun atau turut serta dalam menangani kejadian peristiwa kemarin terkait terbaliknya kapal yang membawa pengunjung menuju pulau kalimantung”

Informan Utama :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Dengan menyediakan akomodasi seperti, penginapan yang berbentuk home stay. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga atau mengoperasikan home stay tersebut jika ada wisatawan yang ingin menginap di pulau kalimantung

Informan tambahan (Dika) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Informan tambahan (sara) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Informan tambahan (Andi Marbun) :

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah
- b. terkait peristiwa kecelakaan terbaliknya kapal yang membawa pengunjung atau wisatawan menuju pulau kalimantung kemarin, apakah pemerintah turut serta dalam menangani peristiwa tersebut

Informan tambahan (Rafi Ardiansyah):

- a. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah

Faktor Penghambat Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pulau kalimantung di kabupaten Tapanuli Tengah:

1. **Pemerintah sebagai Regulator**

Informan kunci :

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan

Informan Utama :

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan

2. **Pemerintah sebagai Dinamisator**

Informan tambahan (Andi Marbun) :

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan
- b. Apakah sosialisasi regulasi benar-benar tidak dilakukan, atau hanya kurang menjangkau pelaku usaha tertentu

Informan tambahan (Rafi Ardiansyah):

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan
- b. Apakah pengawasan yang dilakukan pemerintah sudah cukup untuk membantu pelaku usaha memahani kekurangan yang perlu diperbaiki

Informan tambahan (Dika) :

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan

3. **Pemerintah sebagai Fasilitator**

Informan tambahan (sara) :

- a. Apa faktor penghambai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Pulau Kalimantan

Lampiran Dokumentasi



Gambar 5.1 Kantor Dinas Pariwisata Kbaupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)



Gambar 5.2 Wawancara PJ Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.2 Wawancara Kepala Bidang Pengembangan Objek wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.3 Wawancara Pengusaha sektor Swasta sebagai Nahkoda Kapal di sekitaran Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.4 Lokasi Keberangkatan Kapal dari Kota Pandan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



**Gambar 5.5 Wawancara Pengusaha sektor Swasta Sebagai Penjaga Warung
Sekaligus penjaga di sekitaran Pariwisata Pulau Kalimantan Di Kabupaten
Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.6 Kondisi Warung di Pulau Kalimantan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.7 Kondisi Dermaga yang ada di Pulau Kalimantan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.8 Pondok yang ada di Pulau Kalimantan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.9 Kondisi Kamar Mandi yang ada di Pulau Kalimantan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.10 Kondisi Pom Air yang ada di Pulau Kalimantan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.11 Kondisi Musholla yang ada di Pulau Kalimantan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.12 Kondisi Home Stay yang ada di Pulau Kalimantan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.13 Wawancara Masyarakat atau Pengunjung Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)



Gambar 5.14 Wawancara Masyarakat atau Pengunjung Pulau Kalimantan Di Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)